

## DAFTAR PUSTAKA

- Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) LAN BPKP RI Jakarta.
- Bonaldy, S., F. D. Lengkong., dan Londa. V. Y . 2018. Transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Plasteran Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal akuntansi*.
- Budi Santoso. 2015. *Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor : Ghalia Indonesia. Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Budi Santoso. 2015. *Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Darise, N. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Indeks. Jakarta Kurniawan. H. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014). *Ejournal ekanjuruhan*.
- Debi Putri Pertiwi (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran* Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah ( studi Empiris SKPD provinsi riau). *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Duwi Priyatno. 2013. *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate den Hurgan SPSS*. Yogyakarta: Gaya Media
- A. D., Siti Irene, Desentralisasi dan Partispasi Masyarakat dalam pendidikan ( Yogyakarta: Pustaka Belajar,2011)
- Gerryan Putra. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. 4:2f . <http://iom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/issue/current>. 20 November 2021.
- <http://www.bppk.kemenku.go.id/publikasi/artikel/F147-artikeldananggaranperbendaharaan-danggarandanperbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedurpelaksanaan-keuangan-desa>. 21 November 2021, pukul 14:20

<http://www.keuandangesa.com/2015/03/anggaran-pendapatan-dan-belanjadesa-2>.  
15 November 2021, pukul 14:00

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/atikel.147-artikel;anggaran-dan-perbendaharaan/2Q462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa>. 05 November 2021, pukul 14:04

Imam Ghozali.(2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi kelima. Semarang : Universitas Diponegoro.

Indrianto, N . dan B Supomo, 2014. *Metedologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Cetakan Keenam. BPFEE.,Yogyakarta.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20. Jakarta. Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2010. Nomor 99. Jakata.

Liu, C., L. Zhang., J. Huang., R. Luo dan H. Yi. 2013. Project Design, Village Governance and Infrastructure Quality In Rural China. *China Agricultural Economic* 5.

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UII Press.  
Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Cetakan.Pertama. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Makalalang, A. J., G. B. Nangoe., dan Karamoy, H. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Journal akuntansi dan bisnis*.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.  
Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit Andi.Yogyakarta.

Mas'ud., Safarudin., dan falziah. 2017. Persepsi Pengelola keuangan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. ISSN 2503-1635. *Jurnal akuntansi dan keuangan*. Moleong, L.J. 2014.

Miles, B, M, dan M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Moleong, L. N. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan dana desa. Lembaran Negara republik Indonesia. Jakarta

\_\_\_\_\_. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik; Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*

Peraturan menteri desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang penerapan pengguna Dana Desa tahun 2018. Jakarta .

Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 49 PMK 07 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa (2015) Jakarta : Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (2014). Jakarta : Presiden Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik.

Subroto, A. 2009. Akuntabilitas pengelolaan dana desa [http://eprints.undips.ac.id/7610/J/Agus\\_Subrolo.pdf](http://eprints.undips.ac.id/7610/J/Agus_Subrolo.pdf). 15 November 2021, pukul 19.00